



MENGOPTIMALISASIKAN PERAN SEKTOR PUBLIK DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PADA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Nasya Handini, Mely Darwina, Sharfina Juliana, Yudistira, Wahjoe Pangestoeti

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

ARTICLE INFO

Article history:

Received Januari, 2025

Revised Januari, 2025

Accepted Januari, 2025

Available Januari, 2025

E-mail: nhandini@student.umrah.ac.id,
mdarwina@student.umrah.ac.id,
sjuliana@student.umrah.ac.id,
yudistira@student.umrah.ac.id,
wahjoepangestoeti@umrah.ac.id



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Indonesia

Abstrak

Pengelolaan keuangan negara yang optimal merupakan hal penting untuk mencapai tujuan Pembangunan nasional. Sektor publik memiliki peran penting dalam hal ini, dan Upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara adalah suatu keharusan. Penelitian ini membahas tentang pentingnya optimalisasi peran sektor publik dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara dengan mengkaji beberapa teori dan konsep terkait. Diulas juga beberapa strategi yang dapat dilakukan, seperti peningkatan kualitas layanan, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, dan penggunaan teknologi informasi. Penelitian ini menyoroti beberapa tantangan dalam mengoptimalkan peran sektor publik, seperti birokrasi yang tidak efektif dan keterbatasan sumber daya manusia. Diharapkan dengan memahami konsep dan strategi yang dipaparkan ini, dapat meningkatkan kinerja sektor publik dalam pengelolaan keuangan negara, yang pada akhirnya berkontribusi pada

pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Kata Kunci: Pengelolaan Keuangan Negara, Sektor Publik, Efisien, Efektivitas, Optimaslisasi, Good Governance.

PENDAHULUAN

Keuangan negara sering kali disebut sebagai keuangan publik, dimana istilah publik merujuk pada pemerintah. Dalam konteks yang lebih sempit, keuangan negara dapat diartikan sebagai keuangan pemerintah, yang mencakup cara pemerintah mengumpulkan sumber dana dan cara pengelolaan peneluaran dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Secara lebih luas, aktivitas pemerintah termasuk dalam sektor publik, yang berfokus pada penyediaan barang publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Salah satu tanda mengukur tingkat keterlibatan pemerintah dalam sektor publik dapat dianalisis dari perspektif keuangan. Peningkatan partisipasi pemerintah di sektor ini berimplikasi pada peningkatan alokasi anggaran keuangan. Oleh karena itu, keuangan negara secara umum mencakup aktivitas pemerintah dalam sektor publik. Proses pelaksanaan kekuasaan negara dalam menyediakan barang dan jasa publik merupakan elemen penting dari good governance. Untuk mewujudkan good governance yang efektif dan berhasil, di perlukan semua pihak, termasuk pemerintah dan Masyarakat, harus berkomitmen. Untuk mencapai good governance yang berkualitas, perlu koordinasi yang baik, integritas, profesionalisme, serta semangat kerja dan moral yang tinggi, baik pemerintah maupun masyarakat. Pencapaian aspirasi masyarakat serta tujuan dan cita-cita bangsa dan negara sangat bergantung pada terwujudnya tata kelola yang baik (Indriana, 2018). Dengan demikian, keuangan negara menggambarkan peran atau campur tangan pemerintah dalam aspek sosial dan ekonomi Masyarakat. Dalam usaha mendukung



terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik, pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara professional, transparan, dan akuntabel. Salah satu cara pengelolaan keuangan negara adalah APBN dan APBD yang harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari ini adalah untuk meningkatkan proses penganggaran di sektor publik, agar mencapai good governance.

Sektor publik memainkan peran yang krusial dalam menyediakan informasi akuntansi yang diperlukan oleh pengelola publik untuk menjalankan tugas perencanaan dan pengendalian dalam organisasi. Informasi tersebut berfungsi sebagai alat untuk mendukung tercapainya tujuan pemerintah (clarania & Chici, 2017). Perencanaan dalam sektor publik sangat penting untuk mempersiapkan diri dan menghadapi kondisi di masa depan. Setiap organisasi memiliki berbagai jenis sistem perencanaan yang berbeda-beda, tergantung pada seberapa tidak pasti dan tidak stabil lingkungan yang mereka hadapi. Oleh karena itu, mereka memerlukan sistem perencanaan yang lebih rumit dan maju.

Mardiasmo (2004) dan Mahsun (2013), adalah kemampuan untuk mencapai hasil maksimum dengan penggunaan input tertentu atau sebaliknya, meminimalkan input untuk mencapai hasil yang diinginkan. Efisiensi diukur melalui perbandingan antara output dan input, serta mencerminkan seberapa baik sumber daya digunakan dalam mencapai kinerja yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, Permendagri No. 13 Tahun 2006 menegaskan bahwa efisiensi juga mencakup hubungan antara input dan output dalam penggunaan barang dan jasa oleh organisasi pemerintah.

Di sisi lain, efektivitas, seperti dijelaskan oleh Anggriani (2010), berfokus pada pencapaian hasil yang sejalan dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas diukur berdasarkan seberapa baik hasil yang diperoleh memenuhi harapan atau target yang diinginkan. Semakin besar kontribusi hasil terhadap target, semakin efektif organisasi tersebut. Dengan demikian, efisiensi berkaitan dengan optimalisasi penggunaan sumber daya, sedangkan efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan akhir. Keduanya merupakan indikator penting dalam menilai kinerja organisasi.

Penilaian terhadap efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan dapat dilakukan melalui analisis laporan realisasi anggaran, yang membandingkan anggaran yang direncanakan dengan realisasinya dalam periode tertentu. Penelitian yang dilakukan oleh Rondonuwu (2016) mengenai pengelolaan keuangan daerah di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan Aset (DPKPA) Kabupaten Minahasa Selatan menunjukkan bahwa rata-rata tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah selama tahun anggaran 2011 hingga 2014 mencapai 100,42%. Hal ini mengidentifikasi bahwa pengelolaan keuangan di dinas tersebut sangat efektif. Namun, untuk menilai efisiensi secara menyeluruh, perlu dilakukan analisis lebih lanjut terhadap penggunaan sumber daya dalam mencapai hasil tersebut.

Dalam penelitian ini, ingin membahas tentang bagaimana sektor publik dapat dioptimalkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan negara. Di dalam sektor publik memiliki peran yang sangat penting dalam menyediakan barang dan jasa untuk masyarakat, sehingga pengelolaan keuangannya harus dilakukan dengan cara yang transparan, akuntabel, dan efisien. Hal ini menekankan pentingnya tata kelola pemerintah dan masyarakat. Selain itu, tujuan jurnal ini ingin menjelaskan lebih mendalam mengenai konsep efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan, dengan merujuk pada berbagai karya ilmiah yang mendefinisikan istilah-istilah tersebut.



TINJAUAN LITERATUR

Kerangka teoritis adalah kumpulan konsep yang merupakan hasil pemikiran yang disusun untuk membantu menarik kesimpulan tentang berbagai dimensi. Setiap penelitian pasti melibatkan pemikiran teoritis, karena ada hubungan erat antara teori dan proses pengumpulan, pengolahan, analisis, serta konstruksi data. Sebelum menjelaskan teori, penting untuk memahami dua istilah kunci: konsep dan proposisi. Konsep merujuk pada istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara umum peristiwa, kondisi, kelompok, atau individu dalam ilmu sosial. Di sisi lain, proposisi adalah hubungan logis yang menghubungkan dua konsep. Pemahaman terhadap kedua istilah ini merupakan langkah awal yang penting dalam analisis ilmiah. Terdapat beberapa poin penting dari kerangka teoritis ini, seperti pengelolaan sumber daya, penyediaan barang dan jasa publik, serta menjaga stabilitas ekonomi. Sektor publik berperan sebagai pengatur dan penyediaan layanan yang tidak bisa disediakan dengan baik oleh sektor swasta, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Teori ekonomi kesejahteraan menunjukkan bahwa campur tangan pemerintah dapat meningkatkan efisiensi dalam alokasi sumber daya dan mengurangi ketidakadilan sosial. Di sisi lain, teori fiskal menekankan pentingnya pengumpulan pendapatan melalui pajak untuk mendukung pengeluaran publik yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi. Penelitian Musgrave (1959) menegaskan tanggung jawab sektor publik dalam redistribusi pendapatan dan stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal yang tepat. Dengan demikian, kerangka teoritis ini menunjukkan peran aktif pemerintah dalam mengelola keuangan negara sangat krusial untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan menciptakan kesejahteraan sosial.

Sektor publik memiliki peran penting dalam mengumpulkan pendapatan melalui pajak dan retribusi, serta mendistribusikan anggaran untuk berbagai program yang mendukung program pembangunan ekonomi dan sosial. Dalam analisis yang lebih mendalam, kita perlu memperhatikan seberapa efisien anggaran digunakan, seberapa transparan pengelolaan keuangannya, dan bagaimana kebijakan fiskal mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Penelitian menunjukkan

bahwa ketidakpastian dalam pengelolaan keuangan publik bisa menyebabkan inefisiensi dan korupsi, yang pada akhirnya merugikan Masyarakat secara keseluruhan (Mardiasmo, 2020).

Dalam upaya mengoptimalkan peran sektor publik dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara, sejumlah penelitian sebelumnya telah dilakukan untuk memberikan wawasan berharga. Salah satunya Mardiasmo (2018) yang menyatakan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan negara dapat membuat operasional lebih efisien dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengelolaan anggaran. Dalam studi ini menggunakan pendekatan terhadap kualitatif dengan menganalisis dokumen dan wawancara, yang menemukan bahwa tingkat akuntabilitas yang tinggi dalam sektor publik dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Selanjutnya ada Belli dalam artikel yang ditulis oleh Kim (1997) menyatakan bahwa intervensi pemerintah dalam sektor publik tetap penting, meskipun tidak ada kegagalan yang terjadi contohnya adalah dalam usaha mengurangi kemiskinan dan dalam pengelolaan barang-barang merit. Belli menekankan pada setiap intervensi pemerintah harus mempertimbangkan masalah spesifik yang menghalangi sektor swasta untuk memproduksi barang sosial. Studi yang dilakukan oleh Bartel dan Harrison (1998) mengungkapkan bahwa ketidakefisienan sektor publik di Indonesia pada periode 1981-1995 disebabkan oleh masalah dalam pengawasan serta kondisi operasional yang kurang mendukung, termasuk keterbatasan anggaran dan hambatan dalam persaingan, temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Estache dan Rossi (1999), yang menunjukkan bahwa perusahaan swasta memiliki lebih efisien dibandingkan dengan perusahaan publik dalam sektor air di



kawasan Asia dan Pasifik. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan negara, sektor publik harus mengadopsi teknologi informasi. Selain itu, tantangan ketidakefisienan yang dihadapi oleh sektor publik, serta perbandingan efisiensi dengan sektor swasta, menunjukkan perlunya informasi dalam pengawasan dan pengelolaan sumber daya. Secara keseluruhan, strategi yang berbasis bukti dan terintegrasi sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja sektor publik dalam pengelolaan keuangan negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research), yang melibatkan pengumpulan data dengan mengkaji berbagai literatur dan dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dan optimalisasi sektor publik. Zed (2004) menguraikan empat langkah dalam studi pustaka. Pertama, menyiapkan alat dan perlengkapan yang diperlukan; kedua, menyusun bibliografi kerja; ketiga, mengatur waktu untuk membaca; dan keempat, mencatat informasi yang diperoleh dari penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber primer dan sekunder, termasuk buku-buku tentang keuangan negara, jurnal ilmiah yang berfokus pada sektor publik, laporan kinerja dari lembaga-lembaga pemerintah, peraturan dan kebijakan yang relevan, dan temuan dari penelitian sebelumnya tentang efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara. Analisis data yang digunakan adalah perpaduan antara analisis konten dan analisis deskriptif untuk menilai secara komprehensif berbagai aspek dalam meningkatkan efisiensi sektor publik dalam mengelola keuangan negara. Bahan pustaka yang diperoleh dari berbagai referensi dikaji secara kritis dan komprehensif untuk mendukung proposisi serta gagasan terkait peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara melalui optimalisasi peran sektor publik.

PEMBAHASAN

Sektor Publik

sektor publik adalah suatu konsep yang lebih luas, mencakup tidak hanya unit pemerintah, tetapi juga semua urusan yang bersifat publik. Sektor publik umumnya terdiri dari organisasi yang dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah untuk menyediakan layanan kepada masyarakat. Selain itu, sektor publik merujuk pada tindakan atau kegiatan yang bertujuan untuk memproduksi barang dan jasa atau layanan publik, dengan tujuan memenuhi kebutuhan dan hak masyarakat. Hal ini, sektor publik memainkan peran penting dalam menyediakan layanan yang esensial bagi kesejahteraan masyarakat. Beberapa contoh yang termasuk dalam sektor publik adalah pertahanan nasional, keamanan dalam negeri, perlindungan oleh polisi, pemadam kebakaran, perencanaan kota, pendidikan, pengawasan perpajakan, dan berbagai program sosial (Bastian, 2016).

Mahsun dkk. (2016) sektor publik mencakup semua aspek yang berkaitan dengan kepentingan umum, termasuk penyediaan barang dan jasa kepada masyarakat yang dibiayai melalui pajak atau pendapatan negara lainnya dan diatur oleh hukum. Mengingat luasnya cakupan sektor publik, banyak penyelenggaraan layanan yang diserahkan kepada pasar, meskipun pemerintah tetap melakukan pengawasan melalui regulasi yang ada. Selain itu, beberapa bidang dalam sektor publik berperan penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sambil tetap menjaga pengawasan dan akuntabilitas.

Sektor publik merupakan pelayanan yang menyediakan barang dan jasa untuk masyarakat umum,



dengan pendanaan yang berasal dari pajak dan penerimaan negara lainnya, serta diatur oleh berbagai peraturan. Dari perspektif kegiatan, sektor publik mencakup semua aktivitas yang dibiayai oleh pemerintah, sementara dari segi kepemilikan, sektor ini mencakup semua yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan demikian, sektor publik berfungsi sebagai penyedia layanan yang penting bagi kesejahteraan masyarakat.

Sektor publik muncul sebagai respons terhadap kebutuhan bersama masyarakat beserta barang dan layanan tertentu. Untuk memastikan alokasi dan distribusi barang dan layanan umum yang adil, pengelolaan tersebut diserahkan kepada pihak tertentu (pengurus). Sebagai imbalannya, masyarakat membayar pajak untuk mendukung pengaturan dan penyediaan barang beserta layanan umum oleh pengurus tersebut. Dengan demikian, sektor publik berperan penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan teratur.

Pengelolaan Keuangan Negara

Pengelolaan keuangan negara mencakup berbagai aktivitas yang dilakukan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas keuangan negara, sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Kegiatan ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan akuntabilitas. Prinsip utama dari pengelolaan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan pemerintah, yang bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan dana yang tersedia untuk membiayai semua kegiatan yang telah dijadwalkan.

Menurut C.S.T., untuk mencapai tata Kelola pemerintah yang baik dalam administrasi negara, pengelolaan keuangan negara harus dilakukan dengan profesionalisme, transparan, dan akuntabilitas, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23C yang menegaskan bahwa undang-undang yang mengatur keuangan negara harus merinci ketentuan dasar tersebut menjadi asas-asas umum, seperti asas tahunan, universalitas, kesatuan, dan spesialisasi, serta memasukkan asas-asas baru lainnya. Pengelolaan keuangan negara yang baik sangat bergantung pada penerapan prinsip-prinsip tersebut.

Penerapan praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan negara melibatkan akuntabilitas yang berfokus pada hasil, profesionalisme, proporsionalitas, serta keterbukaan dalam pengelolaan keuangan. Elemen-elemen ini sangat penting untuk memastikan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien.

Ruang lingkup pengelolaan keuangan negara mencakup beberapa aspek, yaitu:

1. Perencanaan anggaran negara
2. Implementasi anggaran negara
3. Pengawasan terhadap anggaran negara
4. Akuntabilitas anggaran negara

Pihak berwenang yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan diharuskan untuk mematuhi prinsip-prinsip umum tertentu untuk meningkatkan standar dan manajemen keuangan. Menurut Djafar Saidi, pengelolaan dana pemerintahan, yang berada di bawah lingkup menteri keuangan yang bertindak sebagai bendahara umum negara, merupakan komponen integral dari administrasi fiskal negara. Dana pemerintah mencakup semua sumber daya moneter yang dikelola oleh bendahara pemerintah, termasuk mata uang domestik dan mata uang asing. Uang negara terdiri dari uang kas negara serta dana yang dikelola oleh bendahara penerimaan dan pengeluaran kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, dan lembaga negara.

Pengelolaan keuangan negara terbagi menjadi dua kategori utama: pengelolaan kas negara dan alokasi penerimaan negara yang dilakukan oleh kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, serta lembaga negara. Kategori ini penting untuk memastikan pengelolaan yang



terstruktur dan efisien dalam penggunaan sumber daya keuangan negara. Selain itu, hal ini juga mencakup pengawasan sumber daya keuangan yang dialokasikan untuk kementerian negara dan lembaga pemerintah non-kementerian. Tujuan dari analisis ini adalah untuk membedakan setiap fungsi untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara diarahkan pada tujuan yang telah ditetapkan.

Prinsip-prinsip dalam Pengelolaan Keuangan Negara

a. Transparansi

Transparansi berarti mengungkapkan suatu informasi tentang keuangan pemerintah kepada publik. Transparansi ini sangat penting ketika mengelola keuangan pemerintah untuk memastikan bahwa warga negara mengetahui bagaimana pemerintah mereka mengumpulkan, mengelola, dan membelanjakan anggaran nasional, ini termasuk transparansi dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan dan pelaporan keuangan.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas mengharuskan pemerintah dan pegawai negeri sipil bertanggung jawab atas semua tindakan dan keputusan mereka yang terkait dengan pengelolaan keuangan publik. Penggunaan dana publik harus bertanggung jawab kepada publik dan regulator.

c. Efisiensi

Efisiensi dalam pengelolaan keuangan publik berarti penggunaan sumber daya publik harus dioptimalkan untuk mencapai hasil yang maksimal dengan upaya yang minimal. Manajemen yang efisien berfokus pada meminimalkan pemborosan, menghindari pengeluaran yang tidak perlu, dan menggunakan sumber daya secara produktif.

d. Efektivitas

Efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan pembangunan melalui penggunaan anggaran yang tepat sasaran. Dana publik harus digunakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam kebijakan nasional, seperti meningkatkan layanan sosial, mengurangi kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

e. Kepatuhan terhadap Hukum

Segala kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Pelanggaran hukum, seperti penyalahgunaan dana dan korupsi, harus dicegah melalui kontrol yang ketat dan sanksi yang jelas.

f. Keadilan

Pengelolaan keuangan negara harus mencerminkan asas keadilan, yaitu anggaran didistribusikan secara merata tanpa diskriminasi berdasarkan daerah, golongan, dan golongan tertentu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Strategi Optimalisasi Peran Sektor Publik

1. Peningkatan kualitas layanan

Menurut Osborne dan Gaebler (1992) dalam mereka “reinventing Government” menyatakan bahwa peningkatan kualitas layanan publik seharusnya menjadi prioritas utama. Mereka menekankan pentingnya inovasi dalam penyampaian layanan agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini mencakup pelatihan pegawai, penerapan teknologi informasi, dan pengembangan standar pelayanan yang jelas.



2. Pengembangan kapasitas SDM

Menurut Grindle dan Haryono (2009:39), pengembangan kapasitas sumber daya manusia bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu dalam menjalankan tanggung jawab profesional dan teknis mereka. Inisiatif ini berfokus pada penguatan kapasitas individu agar dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan lebih efektif dan efisien (Haryono, 2012). Dengan demikian, pengembangan kapasitas sumber daya manusia merupakan langkah penting untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas individu dalam organisasi.

3. Pemanfaatan teknologi informasi

Pemanfaatan teknologi informasi yang mengalami perkembangan pesat saat ini telah memberikan berbagai kemudahan dalam berbagai jenis layanan, termasuk dalam sektor pemerintahan. Teknologi informasi berfungsi sebagai faktor utama yang mendukung pemerintah untuk bersaing dipasar global, serta sebagai sarana untuk berkoordinasi dan mengarsipkan dokumen-dokumen penting. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, kompleksitas tugas manajemen dapat ditangani dengan lebih efektif, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas pelayanan. Teknologi informasi mampu mengatasi tantangan, menciptakan untuk berinovasi, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas, sehingga menjadi penunjang bagi kehidupan yang lebih baik. Baik secara fisik maupun interaktif, yang dirancang berdasarkan teori pembelajaran, (Partawi et.al., 2017).

Pengukuran Efisiensi dan Efektivitas

1. Indikator Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara

Efisiensi dapat diukur melalui perbandingan antara output yang dihasilkan dan input yang digunakan. Contohnya termasuk rasio biaya operasional terhadap total aset. Di sisi lain, efektivitas dapat dievaluasi berdasarkan sejauh mana hasil yang dicapai sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hasil dari ini adalah tingkat pencapaian target pertumbuhan ekonomi, tingkat penyerapan anggaran, atau tingkat keberhasilan program pengentasan kemiskinan. Indikator-indikator tersebut berfungsi untuk menilai apakah pengelolaan keuangan negara dilakukan dengan cara yang efisien dan terarah, sehingga dapat memberikan keuntungan yang maksimal bagi masyarakat.

2. Evaluasi Program

Audit dan evaluasi yang dilaksanakan secara rutin terhadap program-program yang didanai oleh anggaran publik memiliki peranan yang sangat krusial dalam menilai dampak serta keberhasilan program tersebut. Proses evaluasi ini seharusnya menitikberatkan pada aspek efisiensi dan efektivitas, guna memastikan bahwa penggunaan sumber daya publik dilakukan secara optimal dan memberikan hasil yang maksimal. Evaluasi perlu mencakup analisis terhadap sasaran yang telah ditetapkan, proses pelaksanaan, hasil yang diperoleh, serta dampak yang dirasakan oleh penerima manfaat. Dengan adanya data yang valid, evaluasi dapat mengungkapkan kelemahan dan kekuatan dari program yang ada, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program di masa yang akan datang.

Kendala dalam Mengoptimalkan Peran Sektor Publik

Birokrasi sering dianggap sebagai sistem yang menghambat jalannya pemerintahan dan layanan publik, terutama di Indonesia. Gejala inefisiensi dalam sistem birokrasi, yang ditandai dengan kuantitas yang berlebihan dan prosedur yang kaku, telah banyak dikritik (Podungge, 2010). Kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan keuangan masih sering ditemukan. Untuk mewujudkan birokrasi yang

efektif dan memuaskan, penting untuk mematuhi prinsip-prinsip good governance, seperti partisipasi masyarakat, supremasi hukum, transparansi, dan akuntabilitas.



Keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi tantangan signifikan dalam mengoptimalkan peran sektor publik, dimana banyak instansi pemerintah menghadapi kekurangan tenaga kerja yang terampil dan berpengalaman, berdampak pada kualitas layanan publik. Pelatihan dan pengembangan pegawai negeri sering kali tidak memadai, sehingga keterampilan yang dimiliki tidak sesuai dengan kebutuhan modern. Masalah ini semakin diperburuk oleh anggaran yang terbatas, di mana alokasi dana untuk pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia sering kali diabaikan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia sangat penting untuk meningkatkan kinerja sektor publik.

KESIMPULAN

Mengoptimalkan peran sektor publik dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara sangatlah penting. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, sektor publik harus menyediakan layanan yang berkualitas tinggi, transparan, dan akuntabel. Penemuan ini menunjukkan bahwa untuk meraih tujuan tersebut, peningkatan kualitas layanan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal sangat diperlukan, agar sektor publik dapat mengelola keuangan negara dengan baik, tantangan seperti birokrasi yang tidak efisien dan kekurangan sumberdaya manusia harus diatasi. Hambatan-hambatan ini perlu diselesaikan agar sektor publik dapat berkontribusi secara lebih signifikan. Di samping itu, penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti transparan, akuntabilitas, dan keadilan, dalam pengelolaan keuangan pemerintah juga sangat krusial. Penilaian dan audit rutin terhadap program-program harus dilakukan dengan untuk memastikan bahwa sumber daya publik digunakan secara efisien dan memberikan hasil yang optimal. Dengan memahami dan menerapkan konsep efisiensi dan efektivitas, diharapkan kinerja sektor publik dapat meningkat, sehingga mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antasena, D., Crisstin, Y., & Silawati, D. (2023). Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Nian Tana Sikka: Jurnal ilmiah Mahasiswa*, 1(3), 51-70.
- Basnawi, C. (2017). Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui Clinic Center Oleh Unit Pelaksana Teknislaboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah (UPT-LPKD) Jawa Timur. *Kebijakan dan Manajemen Publik*, 5(3), 1-9.
- Fajar, D. N., Pradana, M. R., & Azzurri, S. (2023). Analisis Kebijakan Pengelolaan Keuangan Sektor Publik dalam Mewujudkan Good Governance di Pemerintah Kota Gresik. *Journal of Economics Development Issues*, 6(2), 95-105.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33-54.
- Hardjati, S., Hidayat, E., & Wahyudi, K. E. (2021). *Manajemen Strategi Sektor Publik (Pertama)*. Indomedia Pustaka.
- Hasbar, M. (2011). Reformasi Manajemen Keuangan Sektor Publik. *AkMen JURNAL ILMIAH*, 8(3).
- Juliani, H. (2010). Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Dalam Pengelolaan Keuangan Negara Untuk Mewujudkan Good Governance. *Masalah- Masalah Hukum*, 39(4), 366-371.
- Mj, M. Z. (2023). Reinventing goverment (No. 6fmcx). Center for Open Science.
- Mante Gulo, B., Waruwu, M. H., Mendrofa, S. A., Ndraha, A. B., & Lahagu, P. (2023). Analisis Implementasi Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Masyarakat Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Barat. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 1236-1247.



- Maani, K. D. (2005). Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Demokrasi*, 4(2).
- Musgrave, R. A., & Musgrave, R. A. (1959). *The theory of public finance: a study in public economy* (Vol. 658). New York: McGraw-Hill.
- N. South., J. Tinangon., S. Rondonuwu. Pengukuran Efisiensi dan Efektivitas. *Jurnal EMBA* (Vol.4.No 1 Maret,2016)
- Negara, J. K. (2014). Pengelolaan Keuangan Negara. *KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH*, 29.
- Pinem, C. D. R., Al, D. A. H. P. D., Parinduri, H., Lubis, F. K. L. F. K., Sitompul, R. E. S. R. E., & Afiati, Z. A. Z. (2024). Peran Tata Kelola Sektor Publik dalam Mendukung Efektivitas Kebijakan Publik Pemerintah Daerah. *Konferensi Nasional Mitra FISIP*, 2(1), 519-523.
- Putra, H. C., & Kandar, I. (2022). KONSEP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DAN BARANG-BARANG PUBLIK. *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK)*, 2(2), 57-73.
- Ritonga, P. (2021). *Keuangan Negara*. umsu press.
- Rahayu, S. A. T. (2004). Peranan Sektor Publik Lokal dalam Pertumbuhan Ekonomi Regional di Wilayah Surakarta (1987-2000). *KINERJA*, 8(2), 133-147.
- Wastuhana, Y., & Werdiningsih, R. (2021). Reformasi Birokrasi Era Informasi Teknologi. *Jurnal Media Administrasi*, 3(1), 8-15.